IMR Institute for Migrant Rights

Laporan Tahunan 2026

Pandangan Hukum Migrasi dari Dunia Berkembang: menjadikan hukum yang mengatur pekerja migran mudah ditemukan, dibaca, dan digunakan.

> *"Hukum yang tidak dapat ditemukan tidak dapat digunakan."*

Cianjur, Jawa Barat, Indonesia · theimr.org

KATA PENGANTAR

Menjadikan janji dapat dibaca

Asia Tenggara merupakan salah satu pasar kerja terbesar di dunia. Sedikit kawasan yang begitu bergantung pada orang-orang yang menyeberangi perbatasan untuk bekerja, dan sedikit pula yang telah berjanji sebanyak itu, di atas kertas, untuk melindungi mereka.

Pekerja dari Myanmar, Kamboja, dan Laos menggerakkan ladang, kapal, dan proyek bangunan di Thailand. Pekerja Indonesia dan Filipina merawat rumah tangga di Singapura dan Malaysia. ASEAN mengadopsi Deklarasi Cebu tentang pekerja migran pada 2007 dan sebuah Konsensus untuk melaksanakannya pada 2017. Namun, ajukanlah satu pertanyaan sederhana dalam pertemuan kawasan mana pun, dan tidak ada yang dapat menjawabnya dengan yakin: apa sebenarnya isi hukum negara-negara anggota tentang biaya perekrutan, kontrak, upah, atau hak pekerja untuk berganti majikan? Konsensus tersebut menggantungkan pelindungan pada “hukum, peraturan, dan kebijakan nasional”. Komitmen yang bergantung pada hukum nasional, tanpa catatan yang jelas tentang hukum tersebut, sulit untuk ditagih.

Kawasan ini juga tidak dapat sekadar meminjam perangkat yang sudah ada. Sebagian besar basis data dan indeks hukum migrasi internasional dirancang dan didanai di negara-negara paling maju, sehingga pertanyaannya adalah pertanyaan negara-negara tersebut, yakni suaka, integrasi, dan masuk secara tidak reguler. Perangkat itu kurang memperhatikan hal-hal yang membentuk migrasi di Selatan: nota kesepahaman antarnegara tetangga, izin kerja yang terikat pada satu majikan, arus musiman dan informal, serta peran sentral negara asal.

Laporan ini menjelaskan bagaimana IMR, pada 2026, mulai mengisi kekosongan tersebut, bagi Asia Tenggara dan bagi negara-negara berkembang secara lebih luas. Dengan bantuan banyak relawan, sebagian besar mahasiswa hukum dari berbagai negara, IMR kini menerbitkan 1.540 putusan pengadilan tentang pekerja migran dari 92 negara, atlas 97 norma global, kawasan, dan nasional beserta data ratifikasi di 187 negara, perbandingan dua belas negara asal pada sembilan pertanyaan, serta direktori bantuan hukum gratis di 37 negara. Pengadilan di kawasan ini, dari Mahkamah Agung Filipina hingga pengadilan Malaysia dan Thailand, telah membangun penalaran tentang upah, dokumen, penahanan, dan tanggung jawab perekrut, yang jarang dilihat hakim di luar negaranya masing-masing. Kami ingin penalaran itu terlihat. Sejauh ini, semuanya kami kerjakan tanpa satu pun hibah.

Kami perlu berterus terang. Ini merupakan draf pertama, bukan register yang selesai. Cakupannya belum merata, banyak isian masih menunggu pemeriksaan terhadap teks resmi, dan sebagian pilihan pengodean kami tentu akan dipersoalkan. Kami menerbitkannya lebih awal justru agar pejabat, fakultas hukum, pengawas ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan organisasi pekerja migran dapat menyempurnakannya. Setiap sumbangan dicantumkan namanya dan setiap perubahan dicatat secara terbuka.

Semua ini tidak memerlukan perjanjian baru maupun lembaga baru. Yang diperlukan adalah kesediaan kawasan untuk menuliskan, di satu tempat, apa yang sudah dikatakan hukumnya. Setelah hampir dua dasawarsa berjanji kepada pekerja migran, menjadikan janji-janji itu dapat dibaca merupakan langkah paling sederhana berikutnya, dan mungkin justru yang paling berguna.

Pranoto Iskandar
Direktur Pendiri, Institute for Migrant Rights

Beth Lyon
Ketua Dewan Penasihat IMR

TENTANG KAMI

Lembaga Indonesia bagi mereka yang melintasi batas negara untuk bekerja

Mereka yang bermigrasi untuk bekerja diatur oleh hukum yang tidak mudah mereka temukan atau pahami, yakni perjanjian internasional, aturan lembaga kawasan, serta undang-undang dan putusan pengadilan, baik di negara asal maupun di negara tempat mereka bekerja.

Institute for Migrant Rights (IMR), yang berkedudukan di Cianjur, Jawa Barat, menjawab persoalan tersebut melalui dua cara. Kami memberikan informasi dan bantuan hukum gratis bagi pekerja dan keluarganya, serta menerbitkan data terbuka yang telah dikodekan mengenai hukum migrasi bagi peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Basis data kami dihimpun dengan judul *Pandangan Hukum Migrasi dari Dunia Berkembang* (*Migration Jurisprudence from the South*), karena sebagian besar hukum yang menentukan kehidupan pekerja migran dibentuk dan diterapkan di luar Eropa dan Amerika Utara.

SEKILAS 2026

1,540
putusan pengadilan tentang pekerja migran dari 92 negara

97
norma global, kawasan, dan nasional dalam Atlas Hukum Migrasi

187
negara dengan data ratifikasi perjanjian internasional

115
instrumen tentang pekerja rumah tangga migran di 44 yurisdiksi

91
lembaga bantuan hukum gratis di 37 negara

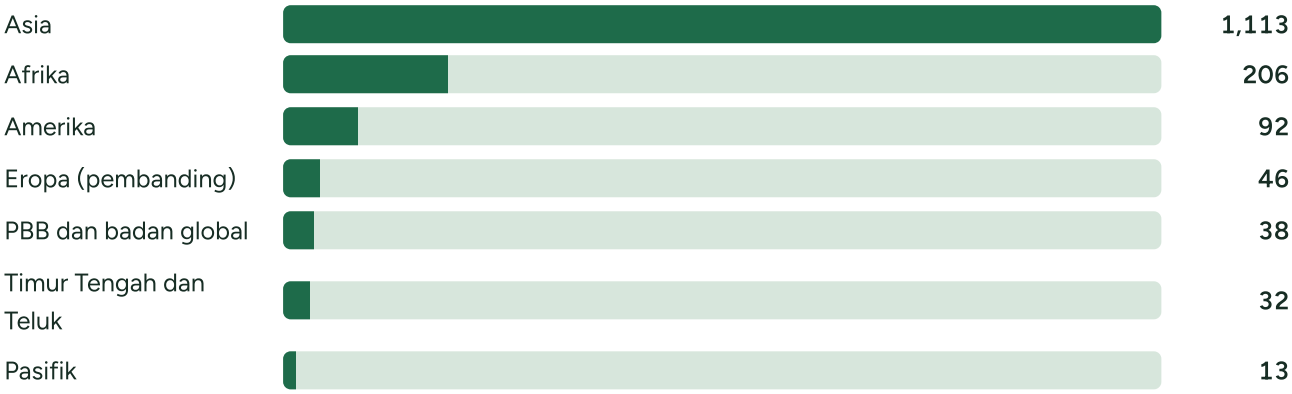
8
bahasa di Klinik Hukum

Terbuka sejak awal. Setiap basis data dapat diunduh beserta buku kodenya dengan lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 (CC BY 4.0). Setiap putusan memiliki ringkasan berbahasa sederhana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

PUTUSAN PENGADILAN

Asal putusan-putusan tersebut

Basis data Putusan Pengadilan menghimpun putusan tentang pekerja migran dari pengadilan nasional, lembaga hak asasi manusia kawasan, dan badan traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin kami utamakan, sedangkan putusan pengadilan Eropa dan Amerika Utara hanya dimuat sebagai pembanding yang diberi tanda.



Putusan menurut kawasan, 20 November 2026 (n = 1.540). Sumber: basis data Putusan Pengadilan IMR, decisions.csv.

Menurut tingkat pengadilan

Pengadilan nasional	1.394
Lembaga kawasan	98
Pengadilan internasional dan badan traktat PBB	48

Di antara putusan pengadilan nasional, 820 putusan berasal dari negara tujuan dan 569 dari negara asal.

Sejauh mana setiap entri diperiksa

Dikodekan lengkap dari sumber sekunder dan ringkasan	225
Kandidat yang menunggu pemeriksaan	1.315
Diperiksa baris demi baris terhadap putusan	sedang berlangsung

Setiap halaman putusan menampilkan statusnya. Metodenya dijelaskan di theimr.org/data-quality.

KEGIATAN KAMI PADA 2026

Lima hal yang kami kerjakan

1 Membuka akses hukum bagi peneliti

IMR menerbitkan rangkaian basis data terbuka yang saling terhubung, mulai dari perjanjian internasional dan instrumen kawasan hingga undang-undang nasional dan putusan pengadilan, yakni Atlas Hukum Migrasi beserta tampilan buruh tani, Putusan Pengadilan, Pekerja Rumah Tangga Migran, Negara Asal, perbandingan hukum migrasi dan ketenagakerjaan di Negara-Negara Teluk, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta Ucapan Kebencian oleh Pemerintah. Setiap entri memuat tautan ke sumbernya dan setiap basis data memiliki buku kode. Pada bulan November, seluruh situs beserta datanya dipindahkan ke repositori GitHub yang terbuka untuk umum, sehingga setiap perubahan tercatat secara terbuka dan proyek lain dapat menyumbangkan data.

2 Mendekatkan hukum kepada pekerja

Klinik Hukum membantu pekerja dan keluarganya menyiapkan pengaduan hak dalam bahasa yang sederhana, dalam delapan bahasa, yakni bahasa Inggris, Indonesia, Arab, Dari/Farsi, Bengali, Nepali, Tagalog, dan Vietnam. Cek mandiri perdagangan orang, panduan tentang argumen yang berhasil di pengadilan, dan direktori bantuan hukum gratis di 37 negara memberikan langkah praktis selanjutnya. Lembar negara satu halaman untuk delapan negara asal tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. IMR tidak menjalankan layanan telepon langsung, sehingga bantuan kami tidak bergantung pada staf yang sedang daring.

3 Menjaga kejujuran data

Setiap basis data menunjukkan sejauh mana setiap entri telah diperiksa, dan sumber sekunder diberi tanda. IMR menerbitkan pernyataan tentang cara kami menggunakan AI serta halaman publik tentang cara kami memeriksa data. Pengodean kedua secara buta terhadap sampel entri, dengan tingkat kesepakatan yang diukur menggunakan Cohen’s kappa, telah direncanakan.

4 Melatih mahasiswa peneliti

Mahasiswa hukum dari fakultas mitra, antara lain Universitas Tarumanagara di Jakarta dan Universitas Khorfakkan di Uni Emirat Arab, belajar menemukan, mengodekan, dan memverifikasi sumber hukum dengan berpedoman pada panduan pemeriksaan dan lembar kerja tertulis.

5 Menerbitkan

IMR Press dibuka di press.theimr.org dengan sembilan judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (tercantum pada halaman 6). *Indonesian Journal of International & Comparative Law* (ijicl.org), jurnal yang ditelaah sejawat sejak 2014, terus terbit.

BASIS DATA

Sepuluh halaman basis data, satu metode

BASIS DATA	ISINYA
Atlas Hukum Migrasi	97 norma pada tiga tingkat (31 global, 37 kawasan, 25 nasional, ditambah 4 laporan utama), dengan data ratifikasi di 187 negara
Tampilan hukum buruh tani	106 norma tentang buruh tani (82 internasional atau kawasan, 24 nasional)
Putusan Pengadilan	1.540 putusan dari 92 negara, dengan ringkasan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
Pekerja Rumah Tangga Migran	115 instrumen di 44 yurisdiksi, dikodekan berdasarkan Konvensi ILO No. 189
Negara Asal	12 negara asal dibandingkan berdasarkan 9 pertanyaan
Negara-Negara Teluk, Asia Timur, Asia Tenggara	Perbandingan netral hukum migrasi dan ketenagakerjaan di negara tujuan
Ucapan Kebencian oleh Pemerintah	34 negara demokrasi, beserta perbandingan pemilu dan warga negara asing
Cari bantuan hukum gratis	91 lembaga di 37 negara; nomor telepon hanya dicantumkan setelah diperiksa

Cara kami memeriksa. Setiap entri berangkat dari sumber resmi sepanjang tersedia, yakni situs pengadilan, lembaran negara, kementerian yang berwenang, ILO, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sumber sekunder hanya digunakan apabila teks resmi tidak dapat ditemukan, dan diberi tanda. Bahan baru disimpan dalam folder tersendiri sampai ditelaah oleh editor.

Angka dihitung dari berkas data yang diterbitkan per 20 November 2026.

PENDANAAN IMR

Sejauh ini didanai secara mandiri. Hingga saat ini IMR belum menerima hibah maupun pendanaan dari pihak luar. Seluruh kegiatan dalam laporan ini didanai secara mandiri dan dikerjakan oleh tim serta relawan IMR. Setiap pendanaan di masa mendatang akan kami laporkan di sini dan di theimr.org.

TIM

Tim kami

Saru Arifin
Direktur Eksekutif; dosen hukum, Universitas Negeri Semarang

Pranoto Iskandar
Direktur Pendiri

Dan Trevanion
Manajer Program

Wallace Huang
Direktur Pengembangan

Michelle Tjugito
Manajer Operasional

Felicia Nathania
Asisten Peneliti; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Klinik Hukum Internasional
Chris Cason · Bambang Suryowidodo · Sudirman

Riset & Publikasi
Nandang Sutrisno · Ratno Lukito · Sarah Ingle · Abdurrachman Satrio · Felicia Nathania

Dewan Penasihat
Beth Lyon (ketua) · Abdullahi Ahmed An-Na'im · Jagdish Bhagwati · Hilary Charlesworth · Tom Ginsburg · Rhoda E. Howard-Hassmann

IMR PRESS

Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual
Pranoto Iskandar

Membela Globalisasi (In Defense of Globalization)
Jagdish Bhagwati

Satu Bumi (One World: The Ethics of Globalization)
Peter Singer

Relasi Negara & Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia
Yudi Junadi

Using World Trade Law to Promote the Interests of Global South
Nandang Sutrisno

Standar Internasional Migrasi Ketenagakerjaan Berbasis HAM
Pranoto Iskandar

Muslim dan Keadilan Global (Muslims and Global Justice)
Abdullahi Ahmed An-Na'im

Tradisi Hukum Indonesia
Ratno Lukito

Pemajuan Kepentingan Negara-Negara Berkembang dalam Sistem WTO
Nandang Sutrisno

KE DEPAN

Rencana 2027

1 Memeriksa putusan

Meningkatkan status putusan dari “telah dikodekan” menjadi “telah diperiksa terhadap putusan”, dimulai dari entri yang paling sering digunakan, serta menerbitkan hasil pertama uji keandalan antarpengode.

2 Membawa hukum ke desa

Sesi literasi hukum dan pelatihan paralegal mahasiswa di kabupaten pengirim pekerja migran di Jawa, apabila pendanaan tersedia.

3 Memperluas cakupan yang masih tipis

Menambah putusan dari Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik, serta dari pengadilan di negara asal.

4 Menerbitkan makalah data

Rilis berversi pertama kini telah diarsipkan di Zenodo dengan pengenal permanen (DOI). Langkah berikutnya adalah menerbitkan dua makalah yang menjelaskan himpunan data tersebut.

5 Memperluas jejaring

Menyambut anggota baru Dewan Penasihat dan fakultas hukum mitra yang baru.

CARA MENGUTIP DATA KAMI

Institute for Migrant Rights (2026). *Migration Jurisprudence from the South: databases of migration and labor law* (Version 2026.11) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24389324

Institute for Migrant Rights
Jl. Amalia Rubini 35, Sayang, Cianjur, Jawa Barat 43213, Indonesia
secretariat@theimr.org · +62 263 271 769 · theimr.org

